

dapat memperkirakan dengan lebih akurat hasil dari pengembangan dan pengelolaan potensi lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat skala prioritas dalam merencanakan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar atau tidak berhenti di tengah jalan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menyusun anggaran belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang riil.

4. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang berada di kuadran IV, perlu melakukan upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek untuk mengembangkan potensi lokal yang nantinya dapat menjadi sumber peningkatan PAD. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti kualitas SDM, sarana dan prasarana dasar serta pendukungnya.
5. Menambah objek penelitian dengan melibatkan Kabupaten/Kota di propinsi-propinsi lain yang ada di Indonesia, khususnya propinsi di luar Pulau Jawa.
6. Menambah periode pengamatan supaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerimaan PAD dan kemampuan keuangan daerah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus kabupaten dan Kota se Jawa- Bali), **Simposium Nasional Akuntansi**. Padang
- Amin Pujiati. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**, 61-70

- Azhari, A.S. 1995. **Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah**. Jakarta : PT Gramedia
- Azwar, S., 1998. **Metode Penelitian**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Brata Kusumah, D. 2001. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : PT Gramedia
- Brata Kusumah, D dan Solihin. 2002. **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Jakarta : PT Gramedia
- Devas, N. 1995. **Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia**. Jakarta : UI Press
- Erlangga Agustino Landiyanto. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya. **CURES Working Paper** No. 05/01, Januari.
- Fajar Hasri Ramadhana, Insyafiah, dan Sunarsip. 2009. **Keuangan Publik : Teori dan Aplikasi**. Jakarta : BPPK Depkeu
- Halim, A. 2004. **Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Harun, Amrullah dan Pan Budi. 2006. Indikator Makro Sosial-Ekonomi sebagai Pengukuran Kinerja Daerah: Kasus Kabupaten Bangka. **CURES Working Paper** No. 06/01
- Imam Ghozali. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: BP Undip.
- Kaho, J.R. 1997. **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah
- Mangkoesebroto, G. 1999. **Ekonomi Publik**. Yogyakarta : BPFU UGM
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi Offset
- Munawir, S. 1992. **Pokok-pokok Perpajakan**. Yogyakarta : Liberty
- Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Deddyk@bappenas.go.id.
- Saragih, J.P. 2003. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Sekaran, U. 2000. **Research Method for Business: A Skill-Building Approach**. Third Edition. New York : John Wiley and Sons, Inc
- Simanjutak, R.A. 1999. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. **Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Flatron untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia**, Padang
- Suparmoko. 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta : Andi Offset
- Supranto, J. 2001. **Statistika Teori dan Aplikasi**. Jakarta : PT Erlangga
- Suryabrata, S. 2000. **Metodologi Penelitian**. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah**
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah**
- UU No. 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah**
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**
- Yani, A. 2002. **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa